

## **BAB V**

### **ANALISIS DATA**

Pada bab ini, penulis akan menganalisis data yang sudah peneliti peroleh sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara, observasi, catatan lapangan, serta dokumentasi kemudian disusun secara sistematis dengan cara diorganisasikan kedalam unit-unit yang kiranya akan membantu peneliti dan pembaca untuk lebih mudah dalam memahami data yang diperoleh dari penelitian ini.

Analisis yang digunakan peneliti mengacu pada kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berikut adalah penjabaran analisis yang sudah dilakukan oleh penulis:

#### **5.1 Efektivitas**

Sebuah program kebijakan dapat dikatakan efektif bila para pelaksana program, atau dalam kasus ini para kader di dalam forum WPA yang ada di tiap komunitas masyarakat dapat memahami dan menjalankan secara baik dan benar tujuan dan fungsi dari program WPA.

Dalam bagian analisis kriteria ini, penulis akan mencoba menganalisis tingkat efektivitas dari program WPA dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan

program-program WPA yang sudah berjalan, tujuan-tujuan program WPA antara lain adalah sebagai berikut:

- Adanya kepedulian masyarakat terhadap Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS dalam bentuk Forum WPA di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Penanggulangan HIV-AIDS
- Meningkatnya dukungan masyarakat dalam Program Penanggulangan HIV-AIDS
- Terlaksananya koordinasi kegiatan Penanggulangan HIV-AIDS di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- Tersedianya bantuan teknis dan pembinaan dalam upaya Penanggulangan HIV-AIDS di masyarakat
- Tersedianya data situasi dan potensi HIV-AIDS di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Dari ketujuh tujuan diatas, secara garis besar setiap tujuan sudah diimplementasikan secara baik dan benar. Mulai dari Forum maupun Kader yang ada langsung di lapangan, WPA Kelurahan Kebon Pisang sangat giat untuk melakukan semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV/AIDS maupun permasalahan yang dihadapi oleh ODHA sesuai dengan pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya baik melalui pelatihan maupun edukasi secara

langsung berupa sosialisasi serta seminar guna meningkatkan kapasitas pengetahuan serta kepedulian masyarakat secara luas mengenai permasalahan HIV/AIDS dan ODHA.

Setiap kader WPA khususnya di Kelurahan Kebon Pisang, memfokuskan setiap pekerjaannya pada penyampaian informasi dan juga pendampingan, yang mengharuskan mereka menemani ODHA yang ada di daerahnya ketika mereka diberikan perawatan medis, dukungan mata pencaharian, atau ketika orang-orang tersebut memiliki masalah terkait dengan status HIV mereka. Kader juga membangun jaringan dengan anggota kelompok atrisk, seperti penasun, orang yang menjual layanan seksual dan anggota kelompok LGBT. Hal ini tentu saja membutuhkan kepercayaan antara kader dan orang-orang yang mereka bantu. Penerima manfaat adalah orang-orang yang tinggal di kelurahan yang sama dengan kader atau tinggal di daerah terdekat di mana layanan tersebut belum tersedia.

*“sejak ada program WPA, kerasa sih sebelumnya banyak yang belum tau bahkan acuh tentang HIV/AIDS ini tapi sekarang jadi lebih tau banyak, dulu kalo ada yang HIV atau AIDS tuh kita masyarakat awam ya ga tau itu penyakit apa, bahkan pas udah tau juga ya justru dikucilin atau dipandanginya negatif aja, tapi kalau sekarang lebih dirangkul dan peduli soalnya sekarang kita sedikit banyak udah ngerti berkat sosialisasi sama penyuluhan yang beberapa kali pernah diadain disini. Berbagi kegiatan di fasilitasi dan kader WPA juga aktif buat terus lakuin pembinaan dan koordinasi kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Terus juga kalau sekiranya ada yang resiko tinggi kena HIV/AIDS, pasti diarahin buat periksa kesehatan ke klinik VTC. Jadi kerasanya dari sejak adanya kader WPA ini, masyarakat juga lebih peduli. Ditambah kalo sosialisasi atau penyuluhan gitu kerasanya pendekatannya ga kaku*

*tapi tetep bikin kita ngerasa penting buat tau dan ikut aktif di kegiatan-kegiatannya”<sup>31</sup>*

Hasil wawancara tersebut juga memperlihatkan bahwa WPA juga merangkul komunitas maupun organisasi yang sudah ada di sekitar Kelurahan Kebon Pisang untuk mendukung kelancaran semua program yang dijalankan. Hal ini yang kemudian sangat membantu dalam meningkatkan antusiasme warga sekitar untuk mengikuti semua program yang diadakan oleh WPA. Dari poin ini, peneliti dapat mengatakan bahwa hasil tujuan dan fungsi dari program WPA sudah berjalan cukup baik dan dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar secara luas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung, pada awalnya masyarakat terlihat acuh dan terkesan tidak peduli dengan keadaan sekitar. Daerah Sumur Bandung juga terbilang cukup terkenal dengan salah satu daerah dengan angka pengguna narkoba tertinggi di kota Bandung. Hal ini yang kemudian menyebabkan kasus penularan HIV/AIDS dan penyebaran ODHA di daerah ini juga cukup pesat dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, dengan hadirnya program WPA ditengah-tengah komunitas masyarakat yang ada di Kelurahan Kebon Pisang, masyarakat terbantu untuk mulai peduli dengan sesama, hal ini jelas menimbulkan efek yang sangat positif, mengingat

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat sekitar Kelurahan Kebon Pisang pada tanggal 15 April 2020.

Kecamatan Sumur Bandung, khususnya di daerah Kelurahan Kebon Pisang, memiliki jumlah ODHA yang sangat tinggi.

Dan juga, hadirnya para kader WPA di lapangan dapat membantu pihak KPA untuk mendata secara langsung kondisi dan situasi riil yang ada juga dan dapat melaporkannya langsung guna pendataan lebih lanjut baik untuk proses bantuan kesehatan maupun sosial dari pemerintah.

## **5.2 Efisiensi**

Pada dasarnya, efektivitas dan efisiensi sangat berhubungan. Tolak ukur kriteria efisiensi dalam satu program kebijakan publik dapat dilihat dari penggunaan sumber daya yang optimal dan dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan dalam satu program kebijakan publik. Jika tujuan sebagai pencapaian oleh suatu kebijakan publik secara nyata menjadi kesederhanaan sementara tarif pengeluaran melewati berbagai pemrosesan kebijakan yang sangat tinggi daripada apa yang dihasilkan dari capaian, maka artinya kegiatan kebijakan sudah mengalami keborosan serta belum efisien.

Dalam kasus Program WPA, program ini khusus dirancang untuk memberdayakan masyarakat. Pemerintah yang diwakili oleh KPA berperan hanya sebagai fasilitator yang menyediakan anggaran sesuai kebutuhan. Program WPA yang berfokus pada masyarakat sebagai kunci utama untuk menjalankan segala intuisi dari tujuan dan fungsinya sudah dapat dikatakan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang mandiri. Hal ini terlihat dari

bagaimana forum dan tiap kader WPA yang ada di lapangan menjalankan program dengan bantuan dari setiap lini kelompok masyarakat yang ada di daerah tempat berjalannya program WPA.

Dari hasil data yang disimpulkan, peneliti mendapatkan informasi bahwa untuk masalah pendanaan yang digunakan oleh forum dan para kader WPA, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, program WPA dapat dibidang berjalan dengan modal seadanya, akan tetapi kekurangan kemudian ditutupi dengan segala usaha agar program tetap berjalan dengan lancar dan sesuai tujuannya. Dengan usaha yang minim, hal ini kemudian membuahkan hasil yang cukup optimal dilihat dari segi biaya dan tenaga. Dengan melihat ratio resources yang digunakan oleh para kader WPA yang berada langsung di lapangan, dapat dilihat bahwa program WPA sudah melukan semua kegiatan dengan seharusnya dan sudah dapat dikatakan berjalan dengan efisien jika dilihat dari segi biaya.

Salah satu kelompok masyarakat yang sangat membantu para kader WPA di Kelurahan Kebon Pisang adalah para kader dari PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Karang Taruna di daerah tersebut.

*“kalau dari kita kader WPA sih banyak dibantu sama ibu-ibu PKK dan anak muda dari Karang Taruna, setiap kegiatan mereka pasti ikut bantu. Biasanya kalau hanya untuk penyuluhan seperti sosialisasi dan semacamnya, kita pakai dana swadaya, ya seadanya. Untungnya ya, di daerah kita warga selalu siap sedia membantu sukarela tanpa upah. Terkecuali agenda khusus untuk teman-teman ODHA, biasanya itu baru kita minta bantuan ke KPA atau menggalang dana dari Lembaga Masyarakat yang biasa membantu, tetapi ya biasanya untuk bantuan dari pihak KPA atau LSM yang mau bantu sih biasanya butuh waktu*

*cukup lama biar sampe cair. Kan ini juga jadi kendala ya, soalnya kesehatan atau ketahanan temen-temen ODHA kan ga sama kayak kita, takutnya nanti j dada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi kita selalu usahain ga sampe ada yang begitu sih.”<sup>32</sup>*

Akan tetapi saat kita melihat kriteria efisiensi dari segi waktu, program WPA dinilai belum cukup efisien. Hal ini diindikasikan dari bagaimana pihak KPA yang menjadi sumber modal utama dalam pendanaan program WPA sering kali memberikan tenggang waktu yang cukup lama dalam mencairkan dana yang dibutuhkan untuk agenda khusus para ODHA seperti pengecekan kesehatan berkala ataupun penyediaan obat untuk para ODHA. Hal ini kemudian menjadi masalah minor yang cukup mengkhawatirkan mengingat para ODHA tidak mempunyai banyak waktu jika permasalahan mereka tidak segera ditindak lanjuti. Masalah ini yang kemudian belum membuat pelaksanaan beberapa agenda program WPA masih belum cukup efisien.

### **5.3 Kecukupan**

Kriteria Kecukupan masih berhubungan dengan kriteria efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh program yang sudah ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemampuan suatu program dalam memenuhi kebutuhan setiap kelompok sasaran adalah poin penting dalam keberhasilan program tersebut dan menjadi tolak ukur dalam menilai kecukupan suatu program.

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Kader WPA Kelurahan Kebon Pisang pada tanggal 15 April 2020.

Jika ditinjau dari fungsi serta tujuan dari program WPA itu, pada indikator ini, kecukupan akan dapat dikatakan terpenuhi jika semua elemen yang menjadi target dari program WPA sudah merasa terbantu dengan adanya program ini. Elemen tersebut tidak lain adalah para ODHA yang tinggal di setiap daerah yang program WPA-nya sudah berjalan dan juga warga masyarakat yang ada di sekitarnya.

Dari observasi yang penulis lakukan, warga sekitar Kelurahan Kebon pisang sudah merasa sangat terbantu dengan adanya para kader WPA yang hadir ditengah-tengah masyarakat. Tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat masyarakat awam secara umum masih membutuhkan edukasi maupun pelatihan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan HIV/AIDS maupun permasalahan yang dihadapi oleh ODHA. Dengan semua prasarana yang WPA sediakan untuk masyarakat sekitar, keberadaan program WPA sangat membantu masyarakat dalam mengerti sejauh mana pentingnya kesehatan bagi warga lokal. Tiap kegiatan program seperti penyuluhan dan atau sosialisasi yang berkaitan langsung dengan masalah HIV/AIDS ataupun yang berkaitan dengan masalah kesehatan lainnya, masyarakat sudah sangat dengan antusias mengikuti setiap programnya dan merasa bahwa program tersebut yang selama ini tidak begitu diharaukan, sebenarnya sangatlah penting untuk kesejahteraan masyarakat secara luas.

*“dari adanya program ini, ga pernah merasa dirugikan justru ngerasain dampak positifnya. dapet banyak manfaat dan jadi lebih*



*banyak tau, peka sama kesehatan sendiri dan juga ODHA di lingkungan ini. Dari penyuluhan atau sosialisasi gitu juga bikin kita jadi lebih peduli.”*

Dan bagaimana dengan ODHA yang menjadi target utama dalam program WPA yang dalam kasus ini berada di daerah Kelurahan Kebon Pisang? Menurut uraian dari salah satu ODHA yang sempat penulis wawancarai dan tidak mau disebutkan namanya, para ODHA yang ada di Kelurahan Kebon Pisang sudah sangat merasa teras teras terbantu dengan hadirnya WPA di daerah tersebut. Mereka yang sebelum adanya WPA terkesan tidak lagi mempunyai harapan untuk bisa hidup seperti manusia biasa pada umumnya mulai menemukan kepercayaan yang baru sejak hadirnya para kader WPA yang membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, para ODHA juga kemudian dapat merasakan untuk bisa kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, terutama sejak perlahan hilangnya stigma negatif terhadap mereka para ODHA.

*“ya senang sih, akhirnya masyarakat yang tadinya mengucilkan saya dan anak saya, akhirnya perlahan mulai bisa terima dan membantu saya. Pelan-pelan udah bisa sosialisasi kayak biasa, ya walaupun ga bisa sebiasa dulu, saya sudah tidak merasa lagi jadi ancaman buat warga sekitar. Ya gimana ya, jadi ada harapan hidup lagi gitu, dan itu udah lebih dari cukup.”<sup>33</sup>*

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu ODHA yang ada di Kelurahan Kebon Pisang, pada tanggal 16 April 2020

Jika dilihat dari beberapa temuan diatas, program WPA yang hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat tersebut terbilang sudah sangat mencukupi kebutuhan para kelompok sasaran.

#### **5.4 Pemerataan**

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria pemerataan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat sudah diberikaan secara merata atau tidak. Pada kriteria ini, manfaat serta distribusi yang diberikan oleh kebijakan atau suatu program yang merata kepada mereka yang menerima dampak langsung menjadi point penting dalam menilai keberhasilan kebijakan atau program tersebut.

Dalam penelitian ini, ukuran pemerataan dilihat dari bagaimana para kelompok sasaran yaitu masyarakat sekitar tempat program WPA berjalan dan juga para ODHA yang tinggal didaerah tersebut sudah merasakan dampak bantuan yang merata atau belum dari hadirnya program WPA di lingkungan mereka.

Dari program WPA yang sudah berjalan terutama yang ada di Kelurahan Kebon Pisang, sampai hari ini menurut data dari narasumber yang sudah penulis coba kumpulkan, hampir dari setiap elemen baik dari masyarakat

maupun ODHA menyatakan sudah sangat merasakan manfaat dan dampak yang positif dari program WPA. Pemerataan distribusi yang diberikan oleh para Kader WPA di lapangan sudah berhasil mencapai semua kelompok sasaran dengan detil. Sebagai salah satu contoh adalah bagaimana susahya bagi ODHA sebelum adanya para kader WPA untuk mendapatkan obat-obatan sebagai penunjang keberlangsungan hidup mereka, yang sekarang sudah terbilang jauh lebih mudah sejak adanya program WPA ditengah-tengah kehidupan mereka.

*“dari Teh Yulia (Kader WPA) juga sering bantu saya untuk ngurus ARV (obat khusus penderita HIV/AIDS) ke dinkes. Sebelumnya mah boro-boro buat dapet ARV, obat biasa saja kadang ga ditanggapin sama puskesmas sini. Sekarang udah bisa dapetin ARV gratis udah alhamdulillah pisan.”<sup>34</sup>*

Dengan hasil data lapangan yang penulis peroleh, penulis kemudian mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut langsung ke KPA, selaku organisasi pemerintah yang memegang komando distribusi setiap program yang dijalankan oleh para kader WPA di lapangan. Dari laporan hasil kegiatan yang diterima oleh KPA Kota Bandung tiap tahunnya terkait dengan kegiatan semua WPA di tiap kecamatan/kelurahan, dapat penulis lihat bahwa WPA di kecamatan/kelurahan lain sudah mulai untuk mengembangkan program WPA di tiap-tiap daerahnya masing-masing.

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan salah satu ODHA yang ada di Kelurahan Kebon Pisang, pada tanggal 16 April 2020

*“hampir seluruh kecamatan dan kelurahan kita gerakan kader dan forum WPA-nya, Cuma ya ga semuanya aktif seperti di Kebon Pisang dan Balong Gede. Tapi tidak berarti bahwa program WPA di daerah lain tidak berjalan, hanya saja tidak begitu aktif seperti di daerah tertentu. Ya ini kan gara-gara ga semua daerah punya masalah yang sama.”<sup>35</sup>*

Hal ini tentu saja berdampak sangat positif, karena dengan berjalannya program WPA di daerah lain sesuai dengan fungsinya, walaupun dengan permasalahan di lapangan yang berbeda, tetapi hal ini juga bisa membantu untuk mencegah daerah lain menjadi parah seperti daerah-daerah yang tingkat permasalahan HIV/AIDS atau jumlah ODHA-nya tinggi.

## **5.5 Responsivitas**

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan ataupun berupa penolakan.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan salah satu pengurus KPA Kota Bandung, pada tanggal 9 April 2020

Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat sejauh mana responsivitas masyarakat terhadap program WPA, dilihat dari bagaimana kebutuhan secara luas tidak hanya yang dibutuhkan oleh ODHA saja. Dalam kasus yang penulis angkat, sejak pertama kali program WPA hadir ditengah-tengah masyarakat terutama pada warga Kelurahan Kebon Pisang, warga sekitar diundang untuk tanggap secara langsung mengenai semua permasalahan HIV/AIDS, terutama bagaimana seharusnya masyarakat harus bisa hidup berdampingan dengan para ODHA. Dilihat dari apa yang peneliti telah pahami, program WPA berbeda dengan program kebijakan pemerintah lainnya yang hanya berupa bantuan yang tinggal dinikmati oleh masyarakat, tetapi lebih dari itu, program WPA dijalankan dengan dasar pemberdayaan masyarakat. WPA menuntut masyarakat secara luas dari setiap elemen untuk memahami dan mendorong tiap individu di dalam masyarakat agar paham akan masalah yang sebenarnya mereka hadapi.

Dari penelitian ini juga, peneliti menemukan bahwa tanggapan masyarakat khususnya di Kelurahan Kebon Pisang sudah sangat mendukung akan tujuan dari program WPA ini. Dukungan masyarakat muncul dari keprihatinan masyarakat setelah mereka mulai mengerti dan paham akan masalah apa yang sebenarnya ada di dalam lingkungan mereka. Seperti yang sudah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, masyarakat di Kelurahan Kebon Pisang sebelum adanya WPA di lingkungan mereka, sangat acuh terhadap masalah mengenai HIV/AIDS dan juga ODHA. Bahkan untuk para ODHA di

kelurahan Kebon Pisang, sebelum adanya WPA mereka hanya berdiam diri di rumah tanpa perhatian dan semua jenis pengobatan yang memadai dan berarti, yang pada akhirnya berujung pada banyak kasus kematian ODHA karena dibiarkan begitu saja tanpa tanggap dari masyarakat, maupun pemerintah yang dalam hal ini seharusnya bisa memberi bantuan lebih bagi mereka.

Setelah pada akhirnya program ini terwujud dan mulai dijalankan, baik masyarakat sekitar kelurahan Kebon Pisang maupun para ODHA yang berada di lingkungan tersebut sangat merespon hadirnya program WPA dengan baik. Terutama adalah bagaimana para ODHA, yang menjadi salah satu target utama dari program WPA merasa sangat terbantu dengan adanya para kader WPA di lingkungan mereka. Masyarakat yang selama ini tidak acuh atau bahkan sama sekali tidak tahu mengenai bahaya dari permasalahan HIV/AIDS sudah mulai sadar akan pentingnya untuk mulai memperhatikan keadaan sekitar. Hadirnya WPA di dalam kehidupan bermasyarakat terutama yang ada di Kelurahan Kebon Pisang membawa suasana baru yang cerah baik untuk ODHA maupun masyarakat warga sekitar.

*“menurut saya sih, saya setuju sama program WPA ini apalagi ngeliat kelurahan kita memang punya angka ODHA yang ga sedikit ya. Jadi dengan adanya program ini pasti ngebantu sekali buat menangani masalah HIV/AIDS di kelurahan kita. Kita sebagai masyarakat sekitar juga bisa jadi lebih peduli. Saya ngerasa program ini udah berjalan sesuai sama apa yang dibutuhin ”<sup>36</sup>*

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Masyarakat Sekitar Kelurahan Kebon Pisang pada tanggal 15 April 2020.

Respon baik dari masyarakat warga sekitar Kelurahan Kebon Pisang juga dapat dilihat dari bagaimana mereka secara antusias membantu semua program kegiatan yang dilakukan oleh forum maupun para kader WPA yang ada di lingkungan mereka. Seperti dari yang penulis dapatkan dari salah satu warga yang ikut serta membantu kader WPA dalam mendata para ODHA dan juga ikut menolong ODHA dalam proses pengobatan.

Respon positif juga didapatkan dari para ODHA dengan melihat bagaimana antusiasme mereka dalam mencoba untuk bersosialisasi dalam masyarakat secara luas dan mulai terbuka dengan kehidupan mereka. Stigma negatif yang sebelumnya menjadi masalah besar kini sudah perlahan hilang dan menjadikan para ODHA lebih bersemangat dalam menjalankan kehidupan mereka.

**Gambar 4. Proses Pendataan *Home Visit* para ODHA oleh Kader WPA**



*Sumber : Dokumentasi Kader WPA*



**Gambar 5. Pengantaran ODHA untuk Melakukan *Lost Follow Up* (LFU) dibantu PKK**



*Sumber: Dokumentasi dari Kader WPA*

## 5.6 Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kesesuaian antara tujuan yang diharapkan dengan hasil dari pelaksanaan program adalah keberhasilan program tersebut. Tujuan-tujuan semula akan nampak pada hasil yang sudah nyata di depan mata menjadi penilaian ketepatan suatu kebijakan atau program tersebut. Indikator ketepatan dinilai dengan kembali melihat tujuan awal dari suatu kebijakan kepada kelompok sasaran.

Dari hasil data yang dikumpulkan peneliti, Masyarakat dan ODHA yang menjadi target ataupun sasaran utama dalam program WPA sudah sangat merasakan manfaat dan tanggap terhadap kebutuhan pada lingkungannya. Perubahan dari berbagai aspek sudah amat sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya para ODHA dalam bertahan hidup. Adanya respon yang positif, antusiasme masyarakat dalam ikut membantu berjalannya program WPA, dan juga keterbukaan para ODHA dalam mengikuti semua arahan dari forum dan kader di lapangan menunjukkan bahwa program WPA sudah cukup tepat untuk hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

*“kalau dibanding dari sebelum ada program ini, yang paling terasa dan keliatan hasilnya sih gimana perubahan masyarakat sekitar jadi lebih peduli terhadap ODHA di lingkungannya. Terus juga ODHA merasa jadi bagian dari lingkungan ini, mereka ga dipandang buruk lagi justru masyarakat suka bantu dan ikut terlibat buat bantu ODHA disini. Kalau kita adain kegiatan juga selalu di respon baik. Jadi ya secara umum sih*

*tujuan dari kita sebagai kader untuk berada di tengah-tengah masyarakat sudah sangat tepat sih.”<sup>37</sup>*

WPA yang saat ini berjalan khususnya di Kelurahan Kebon Pisang, sudah sangat membantu untuk mengubah pola pikir masyarakat secara luas mengenai seberapa pentingnya permasalahan HIV/AIDS dan juga mampu membentuk kepribadian para ODHA untuk tetap bisa menjadi masyarakat yang hidup sama seperti masyarakat pada umumnya, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kelurahan Kebon Pisang sudah menjadi kelompok masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya.

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Kader WPA Kelurahan Kebon Pisang pada tanggal 15 April 2020.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Secara garis besar, Program WPA sudah dapat dikatakan berhasil dijalankan dengan baik dan berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang sudah diharapkan dari hadirnya program ini. Keberhasilan program WPA kemudian bisa dilihat dari bagaimana ditiap kriteria evaluasi kebijakan publik, hasil dari semua data yang sudah diolah dan dianalisis oleh penulis memperlihatkan tingkatan yang tinggi ditiap kriterianya.

Berdasarkan Analisa data yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **6.1.1 Efektivitas**

Didukung dengan data yang ada, program WPA sudah bisa dikatakan berhasil. Efektivitas yang tinggi menjadi salah satu indikator yang dapat membuktikannya, tujuan-tujuan dasar dari program WPA sudah berjalan dan terlaksana dengan baik dan benar. Hadirnya program WPA di tengah kehidupan warga masyarakat dan para ODHA membawa angin segar dalam penyelesaian permasalahan HIV/AIDS. Masyarakat yang sudah tidak memandang permasalahan ini sebagai suatu masalah yang sepele sudah mulai peduli akan sesama baik di lingkungan tempat tinggalnya ataupun di luar itu.

Juga kemudian dengan adanya program WPA, kondisi nyata lapangan bisa ditinjau langsung oleh pihak KPA sebagai komoditas pemerintah yang bersentuhan langsung dengan program WPA yang kemudian memberikan mobilisasi, fasilitasi, serta koordinasi lebih ke pemerintah baik yang berada di daerah maupun pusat guna menganggulangi permasalahan HIV/AIDS. Tingginya efektivitas pada program WPA Kelurahan Kebon Pisang juga bisa dijadikan percontohan untuk daerah lainnya agar program WPA yang ada di masing-masing daerah dapat berjalan dengan tujuan dan fungsi yang sesuai dan tidak sebatas formalitas semata.

#### **6.1.2 Efisiensi**

Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh penulis pada kriteria ini, jika dilihat dari segi sumber daya manusia, program WPA sudah terlaksana dengan efisien dan benar-benar sudah mengoptimalkan setiap lini masyarakat dalam pelaksanaannya. Akan tetapi jika dilihat dari sumber daya modal dan juga biaya operasional yang disalurkan, pendanaan untuk program WPA masih terbilang minim dan sering kali memakan waktu yang tidak sebentar untuk akhirnya bisa dicairkan, tentu saja untuk memberikan perhatian khusus kepada ODHA, para kader WPA membutuhkan suntikan dana juga tenggang waktu yang seharusnya lebih cepat untuk membantu para ODHA dalam penanganan masalahnya baik dari segi kesehatan ataupun ekonomi. Hal ini yang kemudian

membutuhkan perhatian lebih agar program WPA dapat berjalan lebih efisien dalam mengurus setiap permasalahan yang dihadapi oleh para ODHA.

### **6.1.3 Kecukupan**

Dari apa yang sudah penulis temui di lapangan serta data yang juga sudah penulis teliti, penulis dapat mengatakan bahwa program WPA sudah sangat memenuhi hampir setiap kebutuhan yang dibutuhkan baik oleh ODHA sebagai target utama dari program, maupun seluruh masyarakat sebagai warga sekitar yang terkena langsung dampak dari program WPA yang berjalan didaerahnya.

Tentu saja hal ini sangat berpengaruh baik terhadap lingkungan di sekitar warga Kelurahan Kebon Pisang, baik para ODHA ataupun masyarakat merasa sudah sangat terbantu dan tercukupi kebutuhannya dengan adanya program dan terutama para kader WPA di daerahnya.

### **6.1.4 Pemerataan**

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa dengan adanya program WPA di wilayah yang diteliti, distribusi serta manfaat yang diberikan oleh program WPA sudah terbilang merata dan dapat dirasakan dampak positifnya baik bagi sasaran utama program yaitu para ODHA, maupun masyarakat sekitar. Walaupun pada kenyataannya, dari data lainnya yang penulis dapatkan dari pihak KPA Kota Bandung, program WPA belum sepenuhnya berjalan secara

baik dan benar di daerah lain seperti yang sudah berjalan di Kelurahan Kebon Pisang. Hal ini dikarenakan banyak alasan, salah satunya adalah bahwa tidak seluruh kecamatan/kelurahan di Kota Bandung memiliki kasus HIV/AIDS ataupun angka ODHA yang tinggi dan juga minimnya sumber daya manusia. Tetapi dengan pemerataan yang sudah sesuai dan terbilang sangat memenuhi kebutuhan, tingkat pemerataan program WPA sudah terbilang sangat tinggi.

#### **6.1.5 Responsivitas**

Responsivitas dari program WPA sudah terbilang tinggi dan amat sangat positif. Hal ini dapat dibuktikan dengan bagaimana warga sekitar khususnya yang ada dalam ruang lingkup tempat penulis melakukan penelitian, yaitu Kelurahan Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung sudah sangat antusias dengan ikut membantu keberhasilan WPA dalam menjalankan setiap bagian dari programnya.

Selain itu, hampir semua ODHA yang ada dalam lingkungan tempat berjalannya program WPA sudah mendapatkan kemajuan kualitas hidup yang lebih baik. Baik dilihat dari segi kesehatan, ekonomi, sosial maupun politik, para ODHA sudah sangat terbantu untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga yang sama dengan masyarakat lainnya dan hidup dengan keadaan yang layak.

### **6.1.6 Ketepatan**

Jika dilihat dari hasil data dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, program WPA sudah sangat tepat untuk berada diantara kehidupan masyarakat secara umum dan juga ODHA. Hal ini diindikasikan oleh apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dan para ODHA dilihat dari sebelum ada dan berjalannya program WPA. Masyarakat yang sebelumnya acuh terhadap permasalahan dan kehidupan ODHA di lingkungannya sekarang sudah sangat peduli dan beranggapan bahwa masalah tersebut adalah masalah yang harus diselesaikan secara bersama dan semakin siap untuk hidup berdampingan dengan para ODHA yang berada di lingkungannya.



## 6.2 Saran dan Rekomendasi

Melihat dari semua hasil temuan dan kesimpulan yang sudah penulis jadikan satu kesatuan dalam penelitian ini, maka pada bagian ini penulis akan mencoba memberikan beberapa rekomendasi dan saran agar program WPA dapat bisa berkembang dan menjadi kebijakan yang keberhasilannya dapat dijadikan kunci untuk menyelesaikan permasalahan HIV/AIDS baik di Kota Bandung maupun di seluruh Indonesia. Rumusan saran dan rekomendasi yang akan penulis coba sajikan adalah sebagai berikut.

Dilihat dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan kriteria-kriteria evaluasi program kebijakan, WPA memang menunjukkan hasil yang terbilang positif, akan tetapi masih ada satu kriteria yang bisa dibilang masih memerlukan bantuan agar implementasi program ini kemudian dapat berjalan dengan baik secara keseluruhan. Satu kriteria evaluasi dari program WPA yang terbilang masih belum sempurna adalah dari kriteria Efisiensi. Permasalahan ini masih datang dari bagaimana efisiensi waktu sebagai factor penting dalam penyaluran sumber dana yang didapatkan oleh pihak WPA masih memakan waktu yang cukup lama dan ini menjadikan program WPA masih belum sempurna. Kolaborasi antar sektor menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk membenahi permasalahan minor ini. Kelemahan hubungan birokrasi dan atau hubungan struktural antar *stakeholders* menjadikan permasalahan ini sulit untuk dipecahkan. Maka dari itu penulis menyarankan untuk pihak KPA yang menjadi keterwakilan dari program WPA perlu

membuat kebijakan yang spesifik untuk mengatur alur sumber pendanaan yang diterima oleh WPA agar lebih efisien.

Rekomendasi dari penulis adalah bagaimana pihak KPA bisa mengatur dan merancang suatu kebijakan yang bersifat preferentif dan berfokus pada kolaborasi berjalannya program WPA dengan sektor LSM yang terkait. Harapannya adalah LSM dapat menjadi mitra yang membantu pelayanan program untuk menjangkau sasaran dari program WPA baik dari segi pendanaan maupun untuk terjun langsung membantu berjalannya program yang sudah ada ataupun ikut mengembangkan program tersebut. Kebijakan yang nantinya dibuat juga diharapkan dapat lebih memangkas birokrasi yang sudah ada sebelumnya guna mempermudah dan memperlancar pencairan dana untuk program WPA, juga membuka transparansi permasalahan pendanaan agar para kader WPA yang ada di lapangan dapat menyesuaikan dan memprioritaskan program lainnya terlebih dahulu. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memangkas waktu baik dari masalah pencairan dana ataupun setiap rencana kegiatan yang menjadi masalah utama dalam efisiensi program WPA yang sudah berjalan.

Tentu saja saran dan rekomendasi yang dianjurkan oleh penulis membutuhkan kesamaan konsepsi dan persepsi baik dari pemerintah pusat yang diwakilkan oleh KPA maupun dengan para Kader WPA yang ada di lapangan, serta para pemangku kepentingan di LSM terkait dengan permasalahan yang ada. Saat semua pihak sudah setuju dengan hasil yang ingin tercapai, maka program WPA bisa berjalan dengan sempurna serta bisa berkembang menjadi

program kebijakan yang mungkin dapat menjadi kunci dalam menanggulangi semua permasalahan yang terkait dengan HIV/AIDS serta keberlangsungan hidup para ODHA dalam bermasyarakat.

Hasil dari penelitian evaluasi dampak kebijakan program WPA ini nantinya dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang. Dengan adanya evaluasi dampak kebijakan, diharapkan pula dapat memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan dikemudian hari yang berkaitan dengan penanggulangan ataupun penyelesaian masalah HIV/AIDS ataupun para ODHA. Sehingga pentingnya evaluasi dampak ini untuk melihat apakah suatu kebijakan sudah sesuai dengan kondisi dan masyarakat yang terkena langsung kebijakan tersebut dan kedepannya hasil evaluasi ini juga bisa membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan tepat untuk masyarakat secara luas.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agustino L. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta 2008.
- Creswell N.W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.
- Dye T.R. *Understanding Public Policy*. United States of America: PARSON. 2012.
- Dunn, William. N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada. 2003.
- Dunn, William. N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.
- Heryani A. *Paradigma Kebijakan Publik*. Bandung: UNPAD PRESS. 2010
- Ledy P.D, dan Ormrod J.E. *Partical Research Planning and Design*. New Jersey: Pearson Education, Inc. 2005.
- Meriam S.B. *Qualitative Research. A guide to Design and Implementation*. San francisco: Jossey-Bass. 2009.
- Prof.Dr.H. Rahardjo M, M.Si. *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*. 2011.
- Prof. Dr. Yin R.K. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. PT. Raja Grafindo. 2002.
- Ryant. Nugroho. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2003.
- Silalahi U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Winarno B. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: MediaPresindo. 2007
- Winarno B. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo. 2002.

## **Jurnal**

Hasanah, Hasyim. *Teknik-Teknik Observasi*. Jurnal at-Taqaddum Volume 8, No 1 juli 2016.

Asmara, Qiqi. “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sebagai Energi Alternatif.” Thesis, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2009. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129265-T%2026803-Evaluasi%20implementasi-Literatur.pdf>.

## **Kebijakan**

MENDAGRI. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah. 2007

Kemenkes RI Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2013

## LAMPIRAN

### Transkrip dan Coding Hasil Wawancara dengan para *Stakeholders* WPA

#### Evaluasi Program Warga Peduli AIDS (WPA)

Kriteria	Pertanyaan Wawancara	Raw Data	Coding	Final Code
Efektivitas	“Menurut ibu, apa dampak yang dirasakan setelah hadirnya program WPA ditengah-tengah kehidupan masyarakat sekitar di Kelurahan Kebon Pisang?”	<p><b>Ibu Susi (Warga Kelurahan Kebon Pisang)</b></p> <p>“Sejak ada program WPA, kerasa sih sebelumnya banyak yang belum tau bahkan acuh tentang HIV/AIDS ini tapi sekarang jadi lebih tau banyak, dulu kalo ada yang HIV atau AIDS tuh kita masyarakat awam ya ga tau itu penyakit apa, bahkan pas udah tau juga ya justru dikucilin atau dipandanginya negatif aja, tapi kalau sekarang lebih dirangkul dan peduli soalnya sekarang kita sedikit banyak udah ngerti berkat sosialisasi sama penyuluhan yang beberapa kali pernah diadain</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit pelayanan yang disediakan oleh program WPA sudah ada sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pihak KPA</li> <li>• Pencapaian tujuan baik jangka menengah maupun jangka panjang.</li> <li>• Melakukan inovasi guna mencapai target utama dari fungsi dan tugas pokok WPA.</li> </ul>	<p>Pencapaian Tujuan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Meningkatnya kepedulian, peran serta, dukungan masyarakat</li> <li>-Adanya pembinaan dan koordinasi kegiatan.</li> </ul>

		<p>disini. Berbagai kegiatan di fasilitasi dan kader WPA juga aktif buat terus lakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Terus juga kalau sekiranya ada yang resiko tinggi kena HIV/AIDS, pasti diarahin buat periksa kesehatan ke klinik VTC. Jadi kerasanya dari sejak adanya kader WPA ini, masyarakat juga lebih peduli. Ditambah kalo sosialisasi atau penyuluhan gitu kerasanya pendekatannya ga kaku tapi tetep bikin kita ngerasa penting buat tau dan ikut aktif di kegiatan-kegiatannya”</p>		
Efisiensi	<p>“Bagaimana berjalannya pendanaan untuk kegiatan-kegiatan program WPA?”</p>	<p><b>Teh Yulia (Kader WPA)</b>  “Kalau dari kita kader WPA sih banyak dibantu sama ibu-ibu PKK dan anak muda dari Karang Taruna, setiap kegiatan mereka pasti ikut</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Cost-benefit Ratio</i> yang diperoleh oleh WPA</li> <li>• Manfaat bersih dari pelaksanaan setiap</li> </ul>	<p>Adanya partisipasi kegiatan dan partisipasi biaya oleh masyarakat. Dana diperoleh secara swadaya dan masyarakat terlibat secara sukarela</p>

		<p>bantu. Biasanya kalau hanya untuk penyuluhan seperti sosialisasi dan sebagainya, kita pakai dana swadaya, ya seadanya. Untungnya ya, di daerah kita warga selalu siap sedia membantu sukarela tanpa upah. Terkecuali agenda khusus untuk teman-teman ODHA, biasanya itu baru kita minta bantuan ke KPA atau menggalang dana dari Lembaga Masyarakat yang biasa membantu”</p>	<p>kegiatan dari WPA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit biaya yang harus disiapkan oleh KPA selaku pembiaya utama program WPA</li> </ul>	<p>Bantuan KPA Bantuan lembaga masy</p>
Kecukupan	<p>“bagaimana program WPA yang sudah berjalan bisa membantu masyarakat dan atau khususnya ODHA yang ada di lapangan?”</p>	<p><b>Ibu Susi (Warga Kelurahan Kebon Pisang)</b> “dari adanya program ini, ga pernah merasa dirugikan justru ngerasain dampak positifnya. dapat banyak manfaat dan jadi lebih banyak tau, peka sama kesehatan sendiri dan juga ODHA di lingkungan ini. Dari penyuluhan atau sosialisasi gitu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Efektifitas yang stabil dan harus tetap dijaga antara KPA dan program WPA sebagai pelaksana.</li> </ul>	<p>Masyarakat merasakan dampak yang positif</p> <p>Target dari program WPA yaitu ODHA sudah merasa terbantu</p>



		<p>juga bikin kita jadi lebih peduli.”</p> <p><b>ODHA yang tinggal di Kelurahan Kebon Pisang:</b>  “ya seneng sih, akhirnya masyarakat yang tadinya mengucilkan saya dan anak saya, akhirnya perlahan mulai bisa terima dan membantu saya. Saya sudah tidak merasa lagi jadi ancaman buat warga sekitar. Teh Yulia (Kader WPA) juga sering bantu saya untuk ngurus ARV (obat khusus penderita HIV/AIDS) ke dinkes. Ya gimana ya, jadi ada harapan hidup lagi gitu, dan itu udah lebih dari cukup.”</p>		
Pemerataan	<p>“Apakah distribusi yang diberikan oleh program WPA ini sudah diberikan secara merata dan bisa dirasakan manfaatnya untuk para ODHA?”</p>	<p><b>Teh Sis (Pegawai KPA yang mengurus WPA)</b>  “Hampir seluruh kecamatan dan kelurahan kita gerakan kader dan forum WPA-nya, Cuma ya ga semuanya aktif seperti di Kebon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan keadaan yang layak untuk setiap bagian masyarakat yang terlibat dalam program WPA.</li> </ul>	<p>-Perubahan keadaan yang layak</p> <p>-Adanya manfaat positif dari distribusi yang sudah diberikan</p> <p>-Program yang dijalankan merata</p>

		<p>Pisang dan Balong Gede. Tapi tidak berarti bahwa program WPA di daerah lain tidak berjalan, hanya saja tidak begitu aktif seperti di daerah tertentu. Ya ini kan gara-gara ga semua daerah punya masalah yang sama dan tingkat tinggi kasusnya pun berbeda. Tapi walaupun gitu juga semua kecamatan dan kelurahan tetep didorong buat bergerak aktif dan terus berjalan.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pihak yang dirugikan dalam berjalannya program WPA.</li> <li>• Pembagian secara keseluruhan dimana WPA menjalin kemitraan tanpa adanya keuntungan absolut.</li> </ul>	<p>namun tetap sesuai urgensi dan kebutuhan setiap kelurahan dan kecamatan (dilihat dari tingkat tingginya ODHA).</p>
<p>Responsivitas</p>	<p>“Bagaimana tanggapan Bapak terhadap program WPA di Kelurahan Kebon Pisang? Apakah sudah berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan?”</p>	<p><b>Kang Rafi (Masyarakat di Kelurahan Kebon Pisang)</b>  “Menurut saya sih, saya setuju sama program WPA ini apalagi ngeliat kelurahan kita memang punya angka ODHA yang ga sedikit ya. Jadi dengan adanya program ini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana WPA telah melakukan semua kegiatan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa preferensi dari kelompok tertentu.</li> </ul>	<p>-Masyarakat sekitar merespon positif/mendukung program ini berlangsung di lingkungannya.</p> <p>-Program berjalan sesuai dengan kebutuhan tanpa ada prefensi dari pihak lain.</p>

		<p>pasti ngebantu sekali buat menangani masalah HIV/AIDS di kelurahan kita. Kita sebagai masyarakat sekitar juga bisa jadi lebih peduli. Saya ngerasa program ini udah berjalan sesuai sama apa yang dibutuhkan.”</p>		
Ketepatan	<p>“Apakah program ini sudah berjalan sesuai kepada target program dan dijalankan dengan baik dan efisien?”</p>	<p><b>Teh Yulia (Kader WPA)</b>  “Target dari program ini sendiri kan ke ODHA dan masyarakat, kalau dibanding dari sebelum ada program ini, yang paling terasa dan kelihatan hasilnya sih gimana perubahan masyarakat sekitar jadi lebih peduli terhadap ODHA di lingkungannya. Terus juga ODHA merasa jadi bagian dari lingkungan ini, mereka ga dipandang buruk lagi justru</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program WPA sudah menjadikan masyarakat sebagai target utama dari kebijakan.</li> <li>• KPA menjalankan program WPA yang baik serta secara merata dan efisien.</li> </ul>	<p>Adanya kesesuaian antara target dari program ini sehingga KPA menjalankan program WPA sesuai antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang didapat.</p>

		masyarakat suka bantu dan ikut terlibat buat bantu ODHA disini. Kalau kita adain kegiatan juga selalu di respon baik.”		
--	--	--	--	--

## LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/III/2007 Tahun 2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV-AIDS Melalui Program Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 07/PER/MENKO/KESRA/III/2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS Tahun 2007-2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV-AIDS di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
12. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 443/Kep.190-Huk/2007 pada Tanggal 6 Maret 2007 mengenai Pembentukan KPA Kota Bandung;
13. Instruksi Walikota Nomor 004 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS tingkat Kecamatan untuk para Camat;
14. Rencana strategis Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS Kota Bandung Tahun 2007-2011.